



<http://dx.doi.org/10.25157/ja.v12i1.20928>

Strategi Adaptasi Sistem Pengetahuan Adat Komunitas Kampung Kuta dalam Menghadapi Tekanan Globalisasi: Studi Kritis Terhadap Ketahanan Budaya dan Konservasi Alam

Egi Nurholis ^{1*}, Sudarto ², Agus Budiman ³, Dadan Ramdani ⁴

^{1, 2, 3, 4} Pendidikan Sejarah, Universitas Galuh, Indonesia

Email Koresponden: eginurholis@unigal.ac.id ^{1*}

Article history: Submit 2025-05-22 | Accepted 2025-06-18 | Published 2025-06-18

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dampak globalisasi terhadap sistem pengetahuan adat masyarakat Kampung Kuta, Ciamis, serta strategi adaptasi yang mereka terapkan untuk menjaga ketahanan budaya dan kelestarian lingkungan. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, penelitian menemukan bahwa komunitas mengintegrasikan aturan adat (*pamali*), ritual pelestarian hutan, pendidikan budaya, dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan secara selektif. Lembaga adat berperan sebagai mediator utama antara tradisi dan modernisasi, memastikan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Strategi ini tidak hanya mempertahankan identitas budaya, tetapi juga memperkuat fungsi ekologis kawasan adat. Temuan menegaskan bahwa adaptasi berbasis kearifan lokal mampu menghadapi tekanan globalisasi tanpa mengorbankan nilai-nilai inti. Studi ini merekomendasikan pengakuan formal dan dukungan kebijakan terhadap sistem pengetahuan adat sebagai modal sosial penting untuk pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: Strategi adaptasi, pengetahuan adat, Kampung Kuta, ketahanan budaya, konservasi alam

Abstract

This study examines the impact of globalization on the indigenous knowledge system of the Kuta Village community in Ciamis and the adaptation strategies they employ to maintain cultural resilience and environmental sustainability. Using a qualitative approach through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis, the research finds that the community integrates traditional rules (*pamali*), sacred forest preservation rituals, cultural education, and selective use of environmentally friendly technologies. Traditional institutions act as key mediators between tradition and modernization, ensuring sustainable use of natural resources. These strategies not only preserve cultural identity but also strengthen the ecological functions of the customary territory. The findings highlight that local wisdom-based adaptation can effectively respond to globalization pressures without sacrificing core values. The study recommends formal recognition and policy support for indigenous knowledge systems as vital social capital for sustainable development.

Keywords: Adaptation strategies, indigenous knowledge, Kuta Village, cultural resilience, nature conservation

PENDAHULUAN

Globalisasi adalah fenomena kompleks yang memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat adat, termasuk di Indonesia

(Gigoux & Samson, 2015; Smith et al., 2020). Dampak ini mencakup aspek sosial, budaya, dan lingkungan yang mengubah secara cepat kehidupan tradisional komunitas adat. Di berbagai wilayah, seperti Kampung Kuta di

Ciamis, Jawa Barat, masuknya nilai-nilai baru, teknologi, dan pola pikir modern berpotensi mengikis sistem pengetahuan adat yang selama ini menjadi fondasi ketahanan budaya serta pelestarian lingkungan. Proses ini jelas menimbulkan tekanan pada komunitas adat yang selama ini mengandalkan kearifan lokal dan praktik tradisional dalam mengelola sumber daya alam dan kehidupan sosial mereka. Globalisasi tidak hanya membawa perubahan nilai dan norma sosial, tetapi juga menimbulkan risiko erosi budaya dan lingkungan. Dominasi pasar global serta penyebaran ideologi kapitalis menyebabkan terkikisnya sistem pengetahuan masyarakat adat, yang berdampak pada pengurangan ruang hidup dan akses terhadap sumber daya alam penting (Howitt, 2002; Dove, 2006). Dalam konteks keadilan lingkungan, masyarakat adat seringkali terpinggirkan dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi tanah dan mata pencaharian mereka. Studi menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya tersebut tanpa mempertimbangkan perspektif masyarakat adat memperparah degradasi lingkungan serta kerentanan sosial budaya mereka. Hal ini menandakan adanya persaingan antara nilai-nilai global dan lokal yang sulit diseimbangkan. Erosi ini semakin diperburuk dengan perampasan dan penafsiran yang salah terhadap pengetahuan asli oleh pihak luar, yang dapat berujung pada rusaknya warisan biokultural dan hilangnya keanekaragaman budaya (Fernández-Llamazares et al., 2021). Kurangnya pengakuan dan dukungan terhadap perspektif masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan mengenai lingkungan hidup semakin memperparah tantangan-tantangan ini (Sanabria-Rangel, 2023).

Meskipun menghadapi tantangan berat, komunitas adat menunjukkan kemampuan adaptasi dan perlawanan yang signifikan (Kirmayer et al., 2009; Kirmayer et al., 2011). Beberapa telah mengembangkan strategi adaptif dengan mengintegrasikan teknologi modern untuk memperjuangkan hak dan pengakuan adat, mengembangkan model ekonomi alternatif, serta melestarikan praktik-praktik tradisional sebagai respon terhadap tekanan globalisasi. Banyak komunitas telah mengembangkan strategi untuk melawan erosi sistem pengetahuan mereka dan untuk melindungi tanah dan mata pencaharian

mereka (Fernández-Llamazares et al., 2021). Strategi-strategi ini mencakup penggunaan teknologi untuk memajukan tuntutan mereka atas penentuan nasib sendiri, pengembangan sistem ekonomi alternatif, dan pelestarian praktik-praktik tradisional (Hershey, 2019). Pendekatan-pendekatan tersebut menandai usaha komunitas adat untuk mempertahankan identitas budaya sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Namun, literatur terkini masih memperlihatkan kekurangan kajian mendalam tentang strategi adaptasi ini secara komprehensif, sehingga penelitian lebih lanjut sangat diperlukan untuk memahami dan mendukung upaya keberlanjutan masyarakat adat dalam menghadapi globalisasi.

Penelitian ini menitikberatkan pada mekanisme adaptasi komunitas adat dalam menghadapi tekanan globalisasi dengan mengintegrasikan kajian sistem pengetahuan adat, ketahanan budaya, dan penjagaan lingkungan secara simultan, yang masih jarang dieksplorasi. Fokusnya adalah pada strategi adaptasi aktif yang menjaga identitas dan kelestarian lokal sambil mengakomodasi perubahan, seperti yang terlihat pada komunitas adat Tajakembang yang menggabungkan nilai eco-spirituality dan praktik pertanian berkelanjutan sebagai bentuk ketahanan sosial-ekologis (Sudarto et al., 2024). Sistem pengetahuan adat berperan penting sebagai basis identitas budaya sekaligus penjaga lingkungan dan keadilan ekologis, memungkinkan komunitas beradaptasi terhadap modernisasi sekaligus mempertahankan keberlanjutan sosial budaya dan ekologisnya. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa integrasi nilai tradisional dengan praktik kontemporer, diperkaya oleh kerangka sosial dan spiritual, memperkuat kohesi sosial dan ketahanan sistem sosial-ekologis dalam komunitas adat tersebut, sehingga menjadi model yang relevan bagi pengembangan kebijakan pelestarian budaya yang kontekstual dan berkelanjutan di era global.

Komunitas adat memiliki peranan penting dalam melestarikan budaya dan menjaga lingkungan hidup melalui sistem pengetahuan adat yang diwariskan secara turun-temurun (Gadgil et al., 1993; McGregor, 2004). Sistem ini tidak hanya menjadi fondasi identitas budaya, tetapi juga menjadi

mekanisme pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Namun, dengan berkembangnya globalisasi, sistem pengetahuan adat dan praktik budaya lokal menghadapi tekanan besar yang berpotensi melemahkan keberlanjutan kedua aspek tersebut. Globalisasi membawa perubahan dalam pola sosial, budaya, dan ekonomi yang kadang-kadang mengancam praktik adat serta ekosistem yang mereka kelola (Young et al., 2006 Aswani et al., 2018). Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang strategi adaptasi yang diterapkan oleh komunitas adat terhadap tekanan globalisasi sangat penting agar budaya dan lingkungan tetap terjaga secara berkelanjutan.

Kajian literatur memperlihatkan bahwa globalisasi cenderung menyebabkan erosi budaya lokal dan mengancam keberlanjutan lingkungan pada banyak komunitas adat di Indonesia, termasuk di Kampung Kuta (Wijaya, 2025; Fauzan, 2025). Studi-studi terdahulu banyak menyoroti dampak negatif globalisasi seperti perubahan nilai, norma adat, dan penurunan ruang hidup karena tekanan ekonomi dan industri modern. Namun, sebagian besar studi ini belum secara komprehensif mengeksplorasi strategi adaptasi yang dilakukan komunitas dalam menghadapi perubahan tersebut, terutama yang mengintegrasikan aspek budaya dan pelestarian lingkungan secara simultan. Hal ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan penelitian yang mengkaji bagaimana sistem pengetahuan adat berperan dalam menguatkan ketahanan budaya dan lingkungan di tengah arus globalisasi tersebut. Penelitian terdahulu yang berfokus pada Kampung Kuta menyoroti peran tokoh adat dan kearifan lokal dalam menjaga kelestarian hutan sebagai bagian dari pengaturan sosial dan ekologis komunitas (Sardiyarso & Puspitasari, 2018; Hilman et al., 2019; Rohman et al., 2022; Nisa & Surtikanti, 2024). Ada pula temuan mengenai pola adaptasi masyarakat yang menyeimbangkan tradisi dengan perubahan sosial modern (Berkes & Jolly, 2002; Greenfield, 2009; Saefudin et al., 2023). Meski demikian, kajian yang mengintegrasikan secara kritis aspek ketahanan budaya dan pengelolaan lingkungan melalui sistem pengetahuan adat—terutama dalam konteks globalisasi—masih sangat terbatas. Literatur yang ada menunjukkan globalisasi dapat memicu

disrupsi budaya dan ekologi, namun di sisi lain komunitas adat menunjukkan kemampuan adaptasi melalui revitalisasi tradisi dan inovasi lokal sebagai strategi bertahan yang dinamis.

Penelitian yang akan dilakukan bertujuan mengisi kesenjangan riset dengan menawarkan pendekatan komprehensif yang memetakan dan menganalisis strategi adaptasi berlandaskan sistem pengetahuan adat dalam menjaga ketahanan budaya dan pengelolaan lingkungan di Kampung Kuta. Fokus utama adalah bagaimana mekanisme adaptasi tersebut berkontribusi terhadap penguatan nilai budaya dan keberlanjutan lingkungan di tengah tekanan globalisasi yang mengubah tatanan sosial dan ekologi komunitas. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah sekaligus menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang mendukung pelestarian budaya dan lingkungan berbasis kearifan lokal, yang responsif terhadap tantangan global dan memperkuat posisi komunitas adat dalam pembangunan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi lapangan yang difokuskan untuk memahami secara mendalam dinamika sistem pengetahuan adat serta strategi adaptasi masyarakat di Kampung Kuta (Hiwasaki et al., 2014; Leavy, 2022). Teknik pengumpulan data yang diterapkan meliputi wawancara mendalam dengan tokoh adat, sesepuh, pemuda, dan pelaku pelestarian lingkungan yang dipilih secara purposive guna memperoleh informasi yang kaya dan representatif. Selain itu, metode observasi partisipatif dilakukan untuk menangkap peluang dan tantangan dalam praktik penjagaan lingkungan serta keterkaitan ritual adat yang mempengaruhi pelestarian budaya dan ekologi (Moller et al., 2004; Whyte, 2013). Studi dokumentasi juga menjadi bagian penting sebagai pelengkap temuan lapangan, meliputi analisis literatur lokal, arsip adat, serta kebijakan yang mengatur kehidupan sosial budaya komunitas tersebut.

Dalam proses analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis tematik yang diarahkan untuk mengidentifikasi pola-pola adaptasi, bentuk-bentuk ketahanan budaya,

serta praktik penjagaan lingkungan yang berkembang di tengah perubahan sosial dan tekanan eksternal (Crane, 2010; Sterling et al., 2017). Data hasil wawancara dan observasi dikodekan berdasarkan tema utama seperti adaptasi pengetahuan adat, mekanisme internalisasi nilai-nilai tradisional, dan respons terhadap dampak globalisasi serta modernisasi (Cheng et al., 2004; Fauzan, 2025; Wijaya, 2025). Pendekatan ini memudahkan peneliti untuk memahami interkoneksi antara aspek budaya dan ekologis yang saling mempengaruhi, serta bagaimana masyarakat Kampung Kuta berupaya menjaga keseimbangan antara tradisi dan kebutuhan kontemporer (Berkes, 2004; Sallis et al., 2006).

Lebih jauh, penelitian ini menempatkan temuan dalam kerangka teori ketahanan budaya dan keadilan lingkungan yang menyoroti proses adaptasi sebagai dialektika antara tradisi dan modernitas. Dengan membandingkan data empiris dari lapangan dengan kajian literatur regional dan nasional, studi ini menguatkan pemahaman tentang bagaimana tekanan sosial ekonomi dan perubahan lingkungan mempengaruhi pola hidup masyarakat adat. Penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran kaya akan strategi-strategi adaptasi multidimensional, tetapi juga menegaskan pentingnya peran komunitas dalam menjaga kelestarian lingkungan serta nilai-nilai budaya sebagai

bagian dari identitas dan keberlangsungan hidup mereka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

A. Sejarah Komunitas Adat Kampung Kuta – Ciamis dan Aturan Adat

Komunitas Adat Kampung Kuta di Kabupaten Ciamis memiliki sejarah yang sangat erat dengan legenda Kerajaan Galuh. Dahulu, lokasi Kampung Kuta direncanakan menjadi pusat ibu kota Kerajaan Galuh pada masa Prabu Permadikusuma, namun rencana ini batal karena wilayahnya yang dianggap kurang strategis dan terkena banjir dari Sungai Cijolang. Nama "Kuta" berasal dari kata dalam bahasa Sunda yang berarti benteng atau pagar, mengacu pada kondisi geografis kampung yang berada dalam lembah dikelilingi tebing dan perbukitan tinggi setinggi sekitar 75 meter, sehingga membentuk pagar alami yang melindungi pemukiman serta membatasi interaksi yang merusak dengan dunia luar. Menurut penuturan orang tua zaman dulu, Kuta adalah tempat yang akan dijadikan sebuah Ibu kota Galuh namun tidak jadi. Peralatannya sudah lengkap di Kuta tapi karena lahannya tidak *patado domas*.



Gambar 1. Kondisi Kampung Kuta - Ciamis

Secara kultural, masyarakat Kampung Kuta masih memegang teguh warisan leluhur dan kearifan lokal yang mengikat kehidupan sehari-hari, terutama melalui aturan adat yang dikenal dengan istilah pamali (tabu). Aturan adat tersebut mengatur tata cara bertingkah laku yang sangat ketat, mulai dari larangan membangun rumah dengan bahan permanen

seperti tembok—semua rumah wajib berbentuk panggung dari kayu dan bambu dengan atap ijuk—hingga pantangan memasuki hutan keramat hanya pada hari Senin dan Jumat serta larangan memakai pakaian serba hitam saat memasuki tempat keramat. Pemakaman warga juga harus

dilakukan di luar wilayah kampung untuk menjaga kesucian wilayah adat.

Beberapa aturan adat yang sangat dijaga meliputi:

- a) Bangunan rumah harus berbentuk panggung persegi dari kayu dan bambu, tanpa menggunakan material permanen seperti tembok atau genteng. Tidak boleh membuat rumah Letter L atau leter U, tidak boleh rumah berdekatan 3 rumah, jadi satu kompleks hanya bisa 2 rumah. Bentuk rumah harus Jurai. Tata letak isi rumah dibagi 2: tempat masak/tungku lurus dengan ruang tamu, tempat tidur lurus dengan pabeasan.
- b) Melarang pemakaian pakaian serba hitam saat memasuki daerah hutan dan kawasan keramat.
- c) Larangan memasuki hutan larangan (Leuweung Gede) kecuali di hari dan waktu tertentu (Senin dan Jumat).
- d) Pemakaman jenazah dilakukan di luar areal kampung adat. Keranda dibuat

dari alam dan penggunaannya satu kali pakai.

- e) Penghormatan ketat terhadap hutan dan sumber mata air dengan praktik tidak menggunakan alas kaki saat memasuki kawasan hutan untuk menjaga kelestarian alam.

Kampung Kuta juga mempertahankan tradisi ritual dan upacara adat sebagai perwujudan rasa hormat terhadap leluhur dan alam. Salah satu ritual yang penting adalah upacara pelestarian hutan dan budaya lokal yang menjadi wahana penguatan solidaritas sosial sekaligus edukasi nilai budaya dari generasi ke generasi. Struktur kelembagaan adat yang terdiri dari kepala dusun, ketua adat, dan sesepuh memegang peranan vital dalam menjaga pelaksanaan aturan adat dan memediasi berbagai dinamika sosial maupun modernisasi yang masuk ke kampung.



Gambar 2. Kesenian dan Tradisi

Kampung Kuta tidak hanya mempertahankan tradisi secara kaku, namun juga mengadopsi unsur-unsur modern yang dianggap bermanfaat tanpa menghilangkan nilai-nilai adat. Contohnya penggunaan listrik dan teknologi informasi yang disesuaikan dengan prinsip pelestarian lingkungan dan keberlanjutan budaya. Keunikan ini menjadikan Kampung Kuta sebagai desa wisata budaya yang menarik banyak pelajar, peneliti, dan wisatawan yang ingin mempelajari harmonisasi antara adat tradisional dan perkembangan zaman.

Dengan demikian, komunitas adat Kampung Kuta di Ciamis merupakan contoh penting keberlangsungan budaya adat yang terjaga melalui aturan-aturan adat yang ketat dan terstruktur, yaitu pamali dan pelestarian

ritual adat yang selaras dengan alam dan sosial. Ketahanan ini didukung oleh kondisi geografisnya yang unik serta kekuatan struktur sosial dan kultural yang berperan sebagai pengawal kelangsungan tradisi dan kearifan lokal dalam menghadapi tekanan modernisasi.

B. Strategi Adaptasi Sistem Pengetahuan Adat Komunitas Kampung Kuta dalam Menghadapi Tekanan Globalisasi

Hasil penelitian di Kampung Kuta menunjukkan bahwa masyarakat setempat menerapkan strategi adaptasi yang sangat erat kaitannya dengan pelestarian warisan sistem pengetahuan adat sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan terkait penjagaan lingkungan. Penguatan aturan adat yang dikenal dengan pamali menjadi salah satu

bentuk konkret dari upaya menjaga keseimbangan alam dan sosial. Aturan pamali ini tidak hanya mengatur perilaku individu tapi juga membentuk kesadaran kolektif untuk menghormati dan menjaga kelestarian hutan keramat yang dianggap suci dan memiliki nilai filosofis mendalam. Observasi di lapangan menegaskan bahwa larangan dan pantangan dalam aturan adat tersebut dijalankan dengan sangat disiplin, dan pelanggaran terhadapnya dipandang sebagai pelanggaran terhadap harmonisasi antara manusia dan alam.

Selain aturan adat, ritual pelestarian hutan keramat menempati posisi strategis dalam mempertahankan kelestarian lingkungan di Kampung Kuta. Dari hasil wawancara dengan tetua adat dan sesepuh, diketahui bahwa ritual ini bukan sekadar kegiatan simbolis, melainkan bagian dari sistem kepercayaan yang menguatkan keterikatan spiritual masyarakat dengan alam. Ritual dilakukan secara periodik dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, serta menjadi momen penting untuk memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan kesadaran kolektif atas pentingnya menjaga hutan dan sumber daya alam. Dokumentasi yang diperoleh dari lapangan juga menunjukkan bahwa ritual ini mengandung pesan-pesan edukatif yang disampaikan dari generasi ke generasi, menjaga kesinambungan nilai-nilai budaya yang berkelanjutan.

Pendekatan teknologi yang diterapkan masyarakat Kampung Kuta juga memperlihatkan keseimbangan yang terjaga antara tradisi dan kemajuan. Wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan pejabat pemerintahan mengungkapkan bahwa teknologi yang diadopsi adalah teknologi selektif, yaitu yang tidak merusak ekosistem, seperti penggunaan alat pertanian tradisional yang dimodifikasi dengan teknologi modern sederhana. Masyarakat tidak menolak kemajuan, melainkan cermat memilih teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai kelestarian lingkungan dalam adat mereka. Hal ini menunjukkan sikap adaptif dan fleksibel dalam menghadapi modernisasi, menjaga agar perkembangan teknologi tidak mengikis budaya dan sistem ekologis yang ada.

Struktur kelembagaan adat yang kuat merupakan faktor penguat ketahanan budaya di Kampung Kuta. Kepala dusun, ketua adat,

dan sesepuh berperan sebagai pengawal nilai-nilai tradisional sekaligus mediator antara masyarakat dengan dinamika perubahan zaman. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga pejabat tersebut, dapat dipahami bahwa mereka aktif dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan aturan adat, serta menjadi penyambung aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Dengan struktur yang jelas dan legitim, mereka mampu menjaga keseimbangan antara pemeliharaan budaya dan kebutuhan akan perkembangan sosial ekonomi. Kelembagaan ini menjadi benteng utama agar proses modernisasi tidak menggusur nilai-nilai lokal yang sudah mengakar.

Asimilasi antara unsur-unsur modern dan nilai adat dilakukan dengan sangat hati-hati oleh masyarakat Kampung Kuta. Dari perbincangan bersama warga dan tokoh masyarakat, ditemukan bahwa warga tidak menolak modernisasi secara total, namun mereka mengadopsi unsur-unsur yang dianggap bermanfaat tanpa mengurangi nilai dan praktik adat. Contohnya adalah penerapan teknologi informasi dalam pendidikan yang tetap mengedepankan muatan lokal serta tradisi lisan di sekolah-sekolah atau komunitas. Kesadaran ini mengindikasikan adanya kesepakatan sosial yang kuat bahwa modernitas harus melengkapi, bukan menggantikan, kearifan lokal. Pola ini memperlihatkan dinamika sosial yang sehat, di mana tradisi dan modernitas dapat berjalan berdampingan secara harmonis.

Ketahanan budaya Kampung Kuta terlihat jelas dari keberlangsungan tradisi upacara adat, kesenian lokal, serta internalisasi sistem nilai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dokumentasi berupa foto, video, dan catatan lapangan memperlihatkan bagaimana upacara adat rutin dilaksanakan dengan partisipasi aktif masyarakat berbagai generasi. Kesenian tradisional seperti tarian dan musik keramat tetap menjadi bagian yang dihormati dan dipertahankan. Nilai-nilai seperti gotong royong, hormat kepada leluhur, serta tanggung jawab menjaga alam menjadi fondasi bagi eksistensi desa. Kesatuan antara sistem pengetahuan adat, struktur kelembagaan, dan sikap adaptif masyarakat membentuk jaminan kelangsungan budaya yang tidak hanya sebagai warisan masa lalu,

melainkan juga sebagai respon nyata terhadap tantangan zaman.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, wawancara dengan berbagai pihak, serta dokumentasi dari komunitas Kampung Kuta, dapat diuraikan secara rinci mengenai strategi adaptasi yang dikembangkan komunitas ini guna menghadapi dinamika sosial-ekologis di era globalisasi. Pertama-tama, revitalisasi ritual dan tradisi menjadi salah satu pilar

utama dalam menguatkan identitas budaya masyarakat Kampung Kuta. Ritual seperti babarit dan sedekah bumi secara konsisten dipertahankan dan disesuaikan agar relevan dengan konteks zaman kini. Hal ini bukan sekadar pelestarian budaya, tetapi juga sarana mempererat solidaritas sosial di antara anggota komunitas, terutama generasi muda yang menjadi penerus nilai-nilai tersebut.



Gambar 3. Tradisi Komunitas Adat Kampung Kuta

Dari hasil wawancara dengan tetua adat dan beberapa tokoh masyarakat, diketahui bahwa pengintegrasian kearifan lokal dengan teknologi baru dan praktik ekonomi modern juga menjadi strategi adaptasi yang penting. Misalnya, pengelolaan pariwisata berbasis budaya secara selektif memberikan peluang ekonomi tanpa merusak nilai-nilai adat. Teknologi yang diadopsi tetap mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan dan kesesuaian dengan kearifan lokal. Ini menunjukkan bagaimana masyarakat Kampung Kuta tidak menutup diri terhadap kemajuan, namun tetap menjaga harmoni dengan tradisi mereka.

Satu lagi aspek vital adalah pembentukan dan penguatan lembaga adat yang berperan aktif dalam mengatur berbagai kegiatan terkait penjaan lingkungan dan adjudikasi konflik sumber daya alam. Lembaga ini tidak hanya menjadi pengawas adat, tetapi juga menjadi mediator yang bertugas menyelesaikan perselisihan sosial. Dalam wawancara dengan pejabat pemerintahan setempat, terungkap bahwa lembaga adat Kampung Kuta berfungsi sebagai partner strategis dalam menjaga keadilan sosial dan ekologi, tanpa

mengabaikan tata aturan modern yang berlaku.

Selain itu, pendidikan pengetahuan adat kepada generasi muda menjadi fokus yang tak kalah penting. Melalui sekolah adat maupun proses pembelajaran informal di komunitas, nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal diajarkan secara berkelanjutan. Tujuannya tidak hanya menjaga agar budaya tidak pudar, tetapi juga mempersiapkan generasi muda supaya mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, menggabungkan nilai lama dengan tantangan global saat ini. Hal ini disampaikan oleh salah satu anggota masyarakat muda yang mengaku bangga mempelajari adat dari orang tua mereka.

Namun, di balik strategi adaptasi yang dijalankan, komunitas Kampung Kuta menemui berbagai kendala yang cukup kompleks. Tekanan ekonomi dari luar yang memaksa perubahan pola pemanfaatan lahan menjadi tantangan utama. Media global juga membawa pengaruh yang menyebabkan pergeseran nilai budaya di kalangan generasi muda. Konflik kepentingan sumber daya antara pelestarian lingkungan dan pembangunan infrastruktur, terutama dorongan dari pemerintah dan

investor swasta, turut menciptakan ketegangan sosial yang nyata.

Sistem pengetahuan adat yang menjadi fondasi budaya masyarakat Kampung Kuta berperan sangat penting dalam mendukung ketahanan komunitas. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tercermin dalam pelaksanaan ritual, aturan pamali, dan tata cara penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sebuah aturan adat yang ketat diberlakukan terkait pemanfaatan hutan dan sumber daya air, yang membantu menjaga keseimbangan ekologis kawasan lembah tempat Kampung Kuta berada. Hal ini menggarisbawahi bagaimana kearifan lokal memiliki fungsi ekologis yang nyata di samping nilai budaya dan spiritualnya.

Peranan tokoh masyarakat dan lembaga adat sangat sentral dalam mendorong kesadaran kolektif untuk menjaga warisan budaya dan ekologi. Kesadaran ini harus terus ditingkatkan guna melawan dampak negatif dari globalisasi. Dalam beberapa wawancara, tokoh adat menekankan bahwa tanpa keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah setempat, akan sulit mempertahankan ketahanan budaya yang telah bertahan selama berabad-abad.

Inovasi sosial-ekologis yang dilakukan oleh komunitas Kampung Kuta merupakan respons adaptif yang reflektif dan proaktif. Komunitas ini menciptakan mekanisme pengaturan zona hutan adat serta mengembangkan teknologi ramah lingkungan yang diselaraskan dengan nilai kearifan lokal. Dengan demikian, mereka tidak hanya melestarikan tradisi, tetapi juga mengantisipasi perubahan zaman dengan pembaharuan yang menghargai akar budaya.

Akhirnya, hasil dokumentasi menunjukkan bahwa strategi adaptasi Komunitas Kampung Kuta selama ini menjadi mekanisme survival dan ketahanan dalam menghadapi perubahan sosial-ekologis. Dengan menggabungkan pelestarian nilai lama dan kreasi nilai baru, komunitas ini mampu bertahan dan berkembang di tengah tekanan globalisasi tanpa kehilangan identitas dan keutuhan ekosistemnya. Hal ini membuktikan pentingnya integrasi antara kearifan lokal, pengelolaan sumber daya, dan adaptasi teknologi dalam menjaga keberlanjutan komunitas adat.

Pembahasan

Strategi adaptasi Kampung Kuta menggambarkan ketangguhan sosial-ekologis komunitas adat melalui penguatan aturan adat dan pelestarian hutan keramat, yang mengintegrasikan pengetahuan ekologis dan budaya lokal sebagai fondasi penjagaan lingkungan hidup, sesuai dengan model adaptasi komunitas adat yang memadukan konservasi tradisional dan inovasi kontekstual. Pendekatan ini menegaskan teori bahwa keberhasilan adaptasi bergantung tidak hanya pada ketahanan fisik, tetapi juga pada kekuatan sistem sosial budaya dan kelembagaan lokal dalam merespons tekanan globalisasi. Strategi tersebut mencerminkan ketahanan budaya yang dinamis, yang berupaya menyeimbangkan pelestarian nilai tradisional dengan akomodasi perubahan global melalui inovasi sosial dan ekologis lokal responsif terhadap dinamika global, sehingga memperkuat pengetahuan adat sebagai landasan keadilan lingkungan dan pelestarian identitas budaya. Pendekatan ini juga mengimplikasikan teori resilience sosial-ekologis yang menekankan peran interaksi multilevel antara faktor internal dan eksternal dalam mendorong munculnya solusi kreatif berbasis komunitas sebagai respons adaptif terhadap tantangan kompleks perubahan global. Kendati demikian, tekanan globalisasi menghadapkan komunitas pada tantangan dilusi nilai budaya dan perubahan sosial yang cepat, terutama bagi generasi muda yang semakin terpapar budaya asing. Oleh karena itu, revitalisasi budaya dan penguatan pendidikan berbasis kearifan lokal menjadi agenda penting untuk kelangsungan adaptasi jangka panjang. Studi ini menegaskan perlunya dukungan kebijakan dari pemerintah dan institusi lain agar mekanisme adaptasi ini tidak hanya bertahan sebagai praktik lokal, tapi juga mendapatkan pengakuan dan perlindungan formal.

Ketahanan budaya sebagai strategi adaptasi mencerminkan bagaimana sistem pengetahuan adat tidak sekadar dipertahankan secara stagnan melainkan mengalami penyesuaian selektif agar tetap relevan dengan dinamika sosial yang berkembang akibat globalisasi. Dalam

literatur global, konsep adaptasi budaya dijelaskan sebagai proses di mana budaya lokal menyesuaikan diri terhadap pengaruh eksternal tanpa kehilangan identitas dasarnya. Strategi ini penting mengingat arus globalisasi yang membawa nilai, norma, dan teknologi baru yang berpotensi mengikis eksistensi budaya lokal. A. Safril (Universitas Airlangga) menemukan bahwa budaya lokal merespons budaya asing melalui berbagai pola adaptasi seperti penyerapan total, modifikasi bentuk atau isi, dan perpaduan yang menghasilkan identitas baru yang tetap mencerminkan budaya asli (parrot, amoeba, coral pattern). Hal ini mendukung gagasan bahwa ketahanan budaya bukanlah konservatisme pasif, melainkan kemampuan kreatif yang memadukan nilai lama dan baru dalam konteks modern (Mubah, 2011; Panjaitan & Albina, 2025).

Teori ketahanan budaya menegaskan bahwa budaya merupakan sistem dinamis yang mampu beradaptasi dengan tekanan eksternal, seperti modernisasi dan globalisasi, tanpa kehilangan inti nilai-nilai fundamentalnya. Budaya tidak statis, melainkan terus dibentuk ulang melalui interaksi sosial, ekonomi, dan ekologis, sebagaimana ditekankan oleh Clifford Geertz yang memandang budaya sebagai jaringan makna yang dijalin oleh komunitasnya (Geertz, 1973). Studi empiris menunjukkan bahwa sistem pengetahuan adat bertahan dan berinovasi dengan mengintegrasikan elemen baru agar tetap relevan, sehingga ketahanan budaya menjadi proses hidup yang aktif dan kreatif. Adaptasi ini penting untuk mempertahankan identitas budaya di tengah perubahan zaman, dengan pemanfaatan teknologi dan pendidikan sebagai strategi pelestarian budaya yang efektif, sebagaimana ditemukan dalam penelitian terkait dinamika kebudayaan masyarakat adat Indonesia yang menghadapi modernisasi. Modernisasi membawa dampak positif seperti kemajuan teknologi dan perubahan nilai rasional yang mendorong inovasi, namun juga mengancam erosinya identitas budaya lokal terutama pada generasi muda, sehingga upaya pelestarian harus dikelola dengan bijaksana untuk memadukan kemajuan dan keberlanjutan budaya lokal sebagai jati diri bangsa. Pendekatan ini dapat diperkaya dengan teori sosiologi Parsons yang melihat ketahanan sebagai manifestasi keuletan dan ketangguhan

suatu sistem budaya dalam menghadapi perubahan dinamis (Ismadi, 2014; Lauren, 2023; Philia et al., 2025).

Teori resilien ekologi menjelaskan bahwa sistem pengetahuan adat berperan sebagai mekanisme self-regulating yang memastikan stabilitas dan keberlanjutan ekosistem lokal melalui aturan adat, tradisi rotasi lahan, dan praktik pengelolaan yang relasional antara manusia dan alam, memungkinkan komunitas adat bertahan dan pulih dari gangguan ekologis baik alami maupun antropogenik. Hal ini sejalan dengan pandangan Walker et al. (2004) yang menyatakan bahwa sistem yang resilient mampu menyerap gangguan dan mempertahankan fungsi utama. Studi empiris pada komunitas adat, seperti komunitas Tajakembang di Cilacap, menegaskan bahwa integrasi nilai eco-spirituality dan pengetahuan ekologi tradisional dengan praktik berkelanjutan serta kohesi sosial budaya meningkatkan kemampuan adaptasi komunitas terhadap tekanan lingkungan dan sosial, serta memperkuat ikatan sosial dan nilai budaya sebagai dasar ketahanan sosial-ekologis (Sudarto dkk., 2024). Selain itu, teori praktik sosial memperkaya analisis dengan menekankan bagaimana norma, nilai, dan kepercayaan dalam komunitas membentuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, sehingga mekanisme adaptasi ini tidak hanya ekologis tapi juga kultural dan sosial, menciptakan sistem yang dinamis dan resilien dalam menghadapi perubahan dan krisis.

Pendekatan keadilan lingkungan menempatkan lembaga adat sebagai aktor sosial-politik kunci dalam mediasi konflik sumber daya alam yang timbul akibat globalisasi dan pembangunan ekonomi, di mana sistem hukum adat berfungsi sebagai mekanisme keadilan distributif dan restoratif dengan mendistribusikan hak atas tanah dan sumber daya secara adil serta memulihkan kerusakan sosial dan lingkungan. Lembaga adat tidak hanya menjaga keseimbangan kepentingan bersama dan individu, tetapi juga mengintegrasikan nilai kearifan lokal yang memadukan aspek sosial, ekologis, dan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya, menjadikannya benteng penyeimbang antara pembangunan dan pelestarian

lingkungan hidup (Schlosberg, 2007). Dalam konteks ini, keadilan restoratif yang berakar dari nilai-nilai tradisional mengedepankan penyelesaian konflik secara damai dan inklusif, memperkuat peran lembaga adat sebagai mediator yang responsif terhadap kebutuhan komunitas adat dan lingkungan mereka, sekaligus menegaskan pentingnya pengakuan hukum progresif yang memberikan ruang bagi partisipasi dan perlindungan hak masyarakat adat dalam sistem hukum nasional. Pendekatan ini selaras dengan teori hukum lingkungan yang menekankan keadilan antar-generasi dan pentingnya mempertahankan identitas budaya sebagai bagian integral dari pelestarian ekosistem, sehingga lembaga adat menjadi institusi vital dalam mempertahankan keadilan sosial, lingkungan, dan budaya di tengah tekanan modernisasi dan kapitalisme global (Zulfa, 2010; Syahwal et al., 2024). Penjagaan lingkungan berbasis adat merupakan manifestasi konkret dari kearifan lokal yang mengatur interaksi manusia dengan alam secara berkelanjutan. Praktik-praktik tradisional seperti penggunaan sumber daya alam secara selektif, ritual pelestarian, dan aturan sosial yang mengikat komunitas membuktikan efektivitasnya dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem. Penelitian menyatakan bahwa komunitas adat berperan sebagai aktor lingkungan yang tangguh dan adaptif, menegaskan posisi penting mereka dalam pelestarian sumber daya alam di era modern. Pendekatan ekologi budaya menunjukkan bahwa pengetahuan tradisional esensial dalam strategi adaptasi menghadapi perubahan lingkungan dan globalisasi karena kearifan lokal mampu mengintegrasikan pengetahuan empiris dan nilai-nilai spiritual yang mendasari praktik pelestarian (Jadidah et al., 2023; Siregar et al., 2024).

Teori praktik sosial Pierre Bourdieu sangat relevan untuk menganalisis reproduksi modal budaya dan sosial dalam sistem pengetahuan adat, di mana modal budaya berperan sebagai sumber daya simbolik yang mengokohkan identitas kolektif dan struktur sosial, sementara modal sosial berupa jaringan relasi dan kepercayaan memperkuat solidaritas komunitas dan kelangsungan tradisi antar generasi (Bourdieu, 1986). Melalui ritual adat, pendidikan tradisional, serta penegakan aturan oleh tokoh dan

sesebuah, nilai-nilai budaya direproduksi secara kontinu dalam praktik sehari-hari, menegaskan pentingnya agen sosial sebagai pembawa dan pelaksana habitus—suatu sistem disposisi yang terbentuk dari internalisasi struktur sosial dan pengalaman historis serta berperan dalam tindakan sosial (praktik) yang terjadi dalam arena (field) sosial tertentu. Praktik sosial menurut Bourdieu adalah hasil interaksi dialektis antara habitus, modal (kapital), dan arena, menghasilkan kuasa simbolik yang meneguhkan tatanan sosial dan budaya. Dengan demikian, teori ini mengintegrasikan struktur dan agensi, menjelaskan bagaimana pengetahuan adat dipertahankan dan ditransmisikan melalui pola praktik yang melibatkan dimensi subjektif dan objektif sosial secara simultan, serta dapat diperkuat dengan konsep kekerasan simbolik yang melibatkan legitimasi dan dominasi budaya dalam komunitas ($\text{Habitus} \times \text{Modal} + \text{Arena} = \text{Praktik}$) (Mustikasari et al., 2023).

Peran tokoh adat menurut teori peran ganda berfungsi ganda sebagai penjaga tradisi sekaligus agen perubahan yang memfasilitasi harmonisasi antara pelestarian nilai-nilai budaya dengan adaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi modern, sehingga menjaga kelangsungan budaya tanpa menghilangkan identitas historisnya. Teori ini menegaskan bahwa tokoh adat tidak hanya mempertahankan status quo, melainkan juga membuka ruang inovasi yang relevan dengan dinamika zaman, sebagai penghubung antara masa lalu dan masa depan yang memungkinkan komunitas mempertahankan identitas sekaligus menyesuaikan dengan perubahan lingkungan sekitar (Middleton, 2010). Pendekatan ini sejalan dengan pemahaman bahwa peran ganda individu dalam struktur sosial budaya—seperti yang ditemukan dalam kajian konflik peran ganda di masyarakat adat—mencerminkan kebutuhan akan keseimbangan antara tanggung jawab konservasi budaya dan kebutuhan adaptasi fungsional pada tekanan konteks global dan lokal (contohnya, dalam konflik peran perempuan Bali yang harus menjalankan peran tradisional dan modern secara simultan dengan beban psikologis dan sosial). Oleh karena itu, teori peran ganda mencakup dimensi konservasi dan

inovasi dalam dinamika sosial budaya, dimana tokoh adat sebagai aktor kultural adalah elemen kritis dalam mengelola transformasi budaya yang berkelanjutan dan bermakna. Peran lembaga adat sebagai mediator globalisasi sangat strategis dalam menjaga kesinambungan sosial budaya komunitas. Lembaga adat berfungsi sebagai pengatur norma dan simbol identitas yang merespons perubahan sosial dengan menginternalisasi nilai-nilai tradisional ke dalam konteks kehidupan modern. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi penopang warisan budaya tetapi juga penggerak inovasi sosial yang merangkul kemajuan tanpa kehilangan jati diri. Teori sosiologi budaya memberikan landasan penting dalam memahami peran lembaga adat ini, di mana lembaga tersebut mampu menegosiasikan konflik antara nilai lokal dan global dan memfasilitasi dialog antara generasi tua dan muda dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi (Ruslan, 2015; Jadidah et al., 2023).

Adaptasi komunitas adat terhadap teknologi dan sistem ekonomi modern dapat dianalisis melalui teori hibridisasi budaya yang dikemukakan García Canclini (1995), yang menegaskan bahwa globalisasi bukan hanya proses erosi terhadap budaya lokal, melainkan menghasilkan interaksi kompleks yang membentuk budaya campuran baru. Dalam konteks ini, sistem pengetahuan adat tidak tergerus, melainkan bertransformasi dengan mengintegrasikan elemen-elemen teknologi dan ekonomi baru secara selektif dan kreatif, sehingga mempertahankan sekaligus memperkuat identitas budaya asli. Pendekatan ini sejalan dengan teori akulturasi yang menekankan dinamisnya pertukaran budaya serta teori ekologi budaya yang melihat adaptasi sebagai respons strategis terhadap tekanan lingkungan sosial-ekonomi, menggarisbawahi bahwa budaya lokal mampu mempertahankan prinsip-prinsip fundamentalnya sambil berinovasi, menghasilkan bentuk budaya yang toleran dan adaptif terhadap perubahan global tanpa kehilangan esensi tradisionalnya.

Konflik antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan merupakan dilema klasik dalam pembangunan berkelanjutan yang menuntut keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan konservasi ekosistem, sebagaimana ditegaskan oleh

WCED (1987). Sistem pengetahuan adat berperan strategis sebagai penyeimbang dengan menyediakan norma, nilai, dan praktik lokal yang menuntun pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan lestari, mencegah kerusakan lingkungan sekaligus memastikan keadilan antar generasi. Dalam konteks ini, pendekatan pembangunan berkelanjutan menolak prinsip trade-off yang melihat pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan sebagai pilihan saling meniadakan, melainkan mengusung prinsip sinergi yang memadukan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara simultan dan harmonis untuk mencapai kesejahteraan menyeluruh. Teori pembangunan hijau atau green growth kian relevan sebagai paradigma baru yang mengedepankan integrasi ekonomi dan konservasi lingkungan, menghindari eksploitasi berlebihan sekaligus menyusun kebijakan berbasis nilai keberlanjutan, termasuk melalui pemanfaatan kearifan lokal yang telah lama terbukti menjaga kelestarian sumber daya alam dan ekosistemnya secara berkelanjutan. Pendekatan ini juga menegaskan pentingnya sistem pengetahuan adat sebagai mekanisme budaya yang memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya, memperkuat kapabilitas komunitas lokal dalam mempertahankan fungsi ekologis sekaligus sosial ekonomi secara berimbang. Dengan demikian, konflik pembangunan-ekologi tidak semata masalah teknis ekonomi, melainkan juga problematika norma, nilai, dan sistem sosial budaya yang harus terintegrasi dalam strategi pembangunan modern agar benar-benar berkelanjutan.

Pendidikan budaya berfungsi sebagai strategi kritis dalam menolak homogenisasi budaya global yang mengancam keragaman dan identitas kolektif komunitas adat. Melalui pewarisan nilai, simbol, dan praktik secara turun-temurun, pendidikan adat tidak hanya menjaga kelestarian tradisi tetapi juga mempersiapkan generasi muda untuk menanggapi perubahan sosial dan ekonomi tanpa kehilangan akar budaya mereka. Hal ini sejalan dengan temuan Smith (1999) yang menegaskan bahwa pengajaran budaya lokal memperkuat identitas kolektif dan keberlanjutan budaya melalui proses pembelajaran formal dan ritual sehari-hari

yang menumbuhkan kesadaran nilai leluhur. Dari perspektif analisis yang lebih luas, fenomena homogenisasi budaya global berkaitan dengan globalisasi yang berpotensi mengikis identitas nasional dan lokal, terutama di negara berkembang seperti Indonesia yang mengalami penetrasi budaya asing melalui teknologi informasi dan media massa. Sebagaimana dikemukakan oleh Safril Mubah, globalisasi memicu dominasi nilai budaya maju yang cepat menyebar, menyebabkan terkikisnya nilai-nilai budaya asli dan tradisi lokal. Pendekatan ini mengacu pada teori homogenisasi budaya yang dipaparkan oleh Ritzer (1993), di mana globalisasi mendorong keseragaman budaya yang menghapus partikularitas dan keberagaman (Mubah, 2011). Namun, pendidikan budaya berperan sebagai agen perlindungan dan adaptasi budaya dengan mengintegrasikan inovasi yang tetap relevan dengan norma lokal. Penelitian lain menunjukkan bahwa perlawanan kultural ini dapat berhasil apabila pendidikan adat juga mengakomodasi dinamika sosial ekonomi yang ada, sehingga komunitas dapat mempertahankan kekhasan identitas sambil beradaptasi dengan perubahan global. Contoh praktik di Semarang menunjukkan bahwa penggabungan budaya lokal dengan produk global dapat menjadi strategi mempertahankan keunikan budaya lokal sekaligus menghadapi homogenisasi (Aprinta E. B., 2023; Syakhsiyyah et al., 2025).

Secara teoritis, pendidikan budaya dapat dianalisis menggunakan pendekatan postkolonial dan teori identitas kultural yang menekankan pentingnya ruang simbolik dan praktek sosial dalam menjaga identitas kolektif. Hal ini memungkinkan komunitas adat memodifikasi dan menghidupkan kembali tradisi secara dinamis dalam konteks global tanpa kehilangan esensi kultural mereka. Dengan demikian, pendidikan budaya bukan hanya alat konservasi, tetapi juga medium inovasi budaya yang kritis terhadap tekanan homogenisasi budaya global. Pendidikan budaya adalah strategi efektif melawan homogenisasi global dengan memperkuat identitas kolektif komunitas adat melalui pewarisan nilai dan praktik budaya, sambil mendorong adaptasi inovatif. Pendekatan ini didukung oleh pemahaman teoritik tentang globalisasi sebagai proses homogenisasi yang memerlukan respons

strategis melalui pendidikan budaya dan praktik kultural adaptif (Mubah, 2011; Aprinta E. B., 2023; Syakhsiyyah et al., 2025).

Pemanfaatan aturan dan larangan adat dalam pengelolaan sumber daya alam dapat dipahami sebagai bentuk konkret dari teori pengelolaan commons yang dikembangkan oleh Elinor Ostrom (1990). Ostrom mengkritik pandangan tragedi bersama (tragedy of the commons) Garrett Hardin (1968) yang menyatakan sumber daya bersama pasti akan dieksploitasi secara berlebihan tanpa kontrol eksternal. Ostrom menunjukkan bahwa komunitas lokal dengan pengetahuan mendalam tentang lingkungan mereka mampu mengelola sumber daya bersama secara efektif melalui aturan yang terinstitusi dan mekanisme sosial yang kuat, seperti batasan penggunaan, waktu pengambilan, dan sanksi sosial (Anshori, 2017; Kusumawati, 2022). Menurut Ostrom (1990), keberhasilan pengelolaan sumber daya commons bergantung pada delapan prinsip utama yang meliputi penetapan batas komunitas dan sumber daya yang jelas, penyesuaian aturan dengan kondisi lokal, partisipasi aktif anggota dalam pembentukan dan pengawasan aturan, serta legitimasi sosial dan budaya atas aturan tersebut. Sistem hukum adat yang membatasi akses dan pemanfaatan sumber daya mencerminkan penerapan prinsip-prinsip ini, yang berfungsi meminimalisasi overexploitation dan menjaga kelestarian sumber daya (Kusumawati, 2022). Lebih jauh, teori Ostrom menekankan pentingnya mekanisme pemantauan dan sanksi bertahap yang dilakukan oleh anggota komunitas itu sendiri, serta penyelesaian sengketa yang efisien dan terjangkau. Hal ini memperkuat ikatan sosial dan tanggung jawab kolektif dalam pengelolaan sumber daya bersama. Dalam konteks hukum adat, aturan adat yang diwariskan dan ditegakkan oleh masyarakat setempat berperan sebagai institusi informal yang tumbuh secara alami dan legitimasinya diakui secara sosial, sesuai dengan pengertian institusi dalam analisis Ostrom (Anshori, 2017). Selain dari teori Ostrom, kajian institusi formal dan alamiah juga menegaskan bahwa institusi adat bukan sekadar norma atau kebiasaan, melainkan sistem aturan sosial yang mapan

dan memengaruhi interaksi sosial serta pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam melalui aturan adat tidak hanya menghindari tragedy of the commons tetapi juga menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya bersama secara berkelanjutan (Kusumawati, 2022).

Tantangan yang dibawa globalisasi antara lain tekanan masuknya budaya dan teknologi baru yang bersifat homogenisasi dan bisa mengikis keberagaman budaya lokal. Namun, globalisasi juga membuka peluang revitalisasi budaya melalui kolaborasi dan inovasi modern yang menggabungkan tradisi dengan teknologi informasi dan komunikasi. Pendekatan adaptasi budaya dalam konteks ini menekankan pentingnya keseimbangan antara penerimaan perubahan dengan penjagaan nilai-nilai inti budaya. Strategi ini tidak hanya mempertahankan eksistensi budaya tetapi juga memperkuat identitas lokal yang dinamis sehingga tidak terjebak dalam resistensi yang menutup diri terhadap kemajuan. Paradigma ini diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa globalisasi harus disikapi secara aktif dan kreatif agar dampaknya bisa menjadi positif bagi pelestarian budaya lokal (Mubah, 2011; Ruslan, 2015; Panjaitan & Albina, 2025).

Keseluruhan temuan menegaskan bahwa globalisasi dan modernisasi bukan sebagai agen penghancur budaya dan lingkungan, melainkan justru mendorong transformasi adaptif yang memperkuat ketahanan budaya serta keseimbangan ekologi dalam komunitas adat. Interaksi dengan dunia luar memicu proses inovasi dan revitalisasi budaya yang responsif terhadap tuntutan zaman, tanpa menghilangkan nilai-nilai inti identitas kolektif. Pendekatan ini selaras dengan perspektif transdisipliner dan gagasan Appadurai (1996) mengenai dinamika global yang menghasilkan berbagai “scapes” untuk interaksi budaya kompleks, sekaligus menegaskan bahwa tradisi dan inovasi dapat beriringan menciptakan keberlanjutan dan inklusivitas. Dengan demikian, budaya dan lingkungan lokal tetap menjadi sumber daya penting dalam menghadapi pembangunan berkelanjutan dan perubahan global, serta memberikan dasar kebijakan yang menghormati sistem adat.

Secara keseluruhan, ketahanan budaya dalam era globalisasi merupakan proses dinamis yang melibatkan seleksi dan adaptasi nilai-nilai tradisional melalui peran aktif komunitas dan lembaga adat. Penjagaan lingkungan berbasis adat memperkuat ketahanan ini dengan menegaskan hubungan harmonis antara manusia dan alam, sementara lembaga adat menjadi mediator penting yang memfasilitasi internalisasi nilai tradisional ke dalam kehidupan modern. Meskipun menghadapi tantangan besar berupa penetrasi budaya dan teknologi baru, ketahanan budaya tetap membuka ruang inovasi yang memungkinkan tradisi bertahan sekaligus berkembang dalam konteks global. Pendekatan teoretis dan penelitian empiris di bidang sosiologi budaya, ekologi budaya, dan adaptasi budaya mendukung pentingnya strategi ini untuk menjamin kelangsungan identitas dan keberlanjutan sosial budaya komunitas adat di tengah arus globalisasi (Mubah, 2011; Ruslan, 2015; Jadidah et al., 2023; Siregar et al., 2024; Panjaitan & Albina, 2025).

SIMPULAN

Globalisasi menimbulkan tantangan besar bagi masyarakat adat, khususnya dalam konteks keadilan lingkungan. Erosi sistem pengetahuan masyarakat adat dan penindasan terhadap perspektif lokal merupakan permasalahan penting yang harus diatasi untuk menjamin kesejahteraan dan keberlanjutan masyarakat adat. Mengakui dan mendukung perspektif masyarakat adat sangat penting untuk mencapai keadilan lingkungan dan pelestarian keanekaragaman budaya. Pada akhirnya, sangatlah penting bagi kita untuk mengadopsi pemahaman yang lebih berbeda mengenai globalisasi dan implikasinya terhadap masyarakat adat, yang mengakui pentingnya sistem pengetahuan adat dan perlunya keadilan lingkungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa komunitas adat Kampung Kuta secara cermat mengintegrasikan sistem pengetahuan adat yang holistik dengan strategi adaptasi selektif terhadap pengaruh globalisasi, sehingga mampu memperkuat ketahanan budaya dan keberlanjutan lingkungan.

Melalui penguatan aturan adat, revitalisasi tradisi, pengelolaan lembaga adat, serta pendidikan budaya kepada generasi muda, komunitas ini berhasil menciptakan ketangguhan sosial-ekologis yang tidak hanya menjaga identitas budaya namun juga menjadi modal utama dalam menghadapi dinamika perubahan modern. Pendekatan adaptif ini menegaskan bahwa perpaduan nilai-nilai tradisional dengan seleksi unsur modernisasi dapat menghasilkan strategi keberlanjutan yang lestari bagi komunitas adat di tengah tekanan global. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pendampingan dan kebijakan yang secara formal mengakui serta mengintegrasikan sistem pengetahuan adat dan kearifan lokal ke dalam pendidikan dan pengelolaan kelembagaan adat. Analisis menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas tokoh serta lembaga adat sangat krusial dalam menghadapi tantangan globalisasi, sementara interpretasi praktis merekomendasikan pelestarian budaya berkelanjutan melalui program edukasi yang melibatkan generasi muda dan peningkatan kesadaran masyarakat luas. Dengan demikian, sistem pengetahuan adat tidak hanya dipertahankan sebagai warisan budaya, tetapi juga dijadikan landasan adaptif bagi kebijakan lingkungan dan budaya, memastikan kesinambungan ekologi dan budaya dalam konteks modern.

Pentingnya peran pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memperkuat lembaga adat dan pendidikan budaya lokal sebagai fondasi pelestarian identitas budaya serta pengembangan ekonomi berkelanjutan yang selaras dengan nilai-nilai adat. Komunitas adat Kampung Kuta menunjukkan bagaimana sistem pengetahuan adat berfungsi sebagai strategi adaptasi efektif dalam menjaga ketahanan budaya dan lingkungan di tengah tekanan modernisasi global. Pengelolaan lingkungan yang diatur oleh norma adat memperkuat mekanisme perlindungan ekosistem, di mana lembaga adat dan tokoh masyarakat menjadi aktor sentral dalam keberhasilan adaptasi dan pelestarian budaya, menegaskan keterkaitan erat antara kearifan lokal dan keberlanjutan sosial-ekologis. Pentingnya pengakuan dan legalitas sistem pengetahuan adat oleh pemerintah sebagai modal sosial krusial dalam pembangunan berkelanjutan, menuntut kolaborasi sinergis antara akademisi, pemerintah, dan komunitas adat untuk

merancang model adaptasi yang inklusif dan kontekstual. Selain itu, teks mendorong penelitian lanjutan dengan pendekatan komparatif dan integrasi metode kuantitatif guna mengkaji dampak adaptasi terhadap aspek sosial, budaya, dan lingkungan secara spesifik, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan memadai bagi pengembangan kebijakan yang responsif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, M. (2017). Institusionalisasi Kesejahteraan Komunal:(Studi Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kepemilikan Bersama Di Desa Kemuja Kabupaten Bangka). *Society*, 5(2), 59-83. <https://doi.org/10.33019/society.v5i2.55>
- Aprinta E. B., G. (2023). Globalisasi Budaya, Homogenisasi dan pengaruhnya terhadap identitas budaya lokal. *Janaloka: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2 DESEMBER), 71-80. <https://doi.org/10.26623/janaloka.v1i2%20DESEMBER.8222>
- Aswani, S., Lemahieu, A., & Sauer, W. H. (2018). Global trends of local ecological knowledge and future implications. *PloS one*, 13(4), e0195440. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0195440>
- Berkes, F. (2004). Rethinking community-based conservation. *Conservation biology*, 18(3), 621-630. <https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2004.00077.x>
- Berkes, F., & Jolly, D. (2002). Adapting to climate change: social-ecological resilience in a Canadian western Arctic community. *Conservation ecology*, 5(2). <https://www.jstor.org/stable/26271828>
- Bourdieu, P. (1986). *The Forms of Capital*. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*.
- Cheng, B. S., Chou, L. F., Wu, T. Y., Huang, M. P., & Farh, J. L. (2004).

Sudarto, S., Wardo, W., Sariyatun, S., & Musadad, A. A. (2025). Integrasi Pedagogi Reflektif dan Eco-Pedagogy dalam Konstruksi Kausalitas Sejarah: Membangun Kesadaran Nilai Lingkungan Melalui Landscape Budaya dalam Pembelajaran Sejarah. *Jurnal Artefak*, 12 (1), 213 – 236.

- Paternalistic leadership and subordinate responses: Establishing a leadership model in Chinese organizations. *Asian journal of social psychology*, 7(1), 89-117. <https://doi.org/10.1111/j.1467-839X.2004.00137.x>
- Crane, T. A. (2010). Of models and meanings: Cultural resilience in social-ecological. *Ecology and Society*, 15(4). <https://www.jstor.org/stable/26268225>
- Dove, M. R. (2006). Indigenous people and environmental politics. *Annu. Rev. Anthropol.*, 35(1), 191-208. <https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.35.081705.123235>
- Fauzan, A. (2025). The Transformation of Traditional Culture in Responding to the Challenges of Globalization in Local Indonesian Communities. *The Journal of Academic Science*, 2(3), 1021-1030. <https://doi.org/10.59613/42jzr037>
- Fernández-Llamazares, Á., Lepofsky, D., Lertzman, K., Armstrong, C. G., Brondizio, E. S., Gavin, M. C., ... & Vaughan, M. B. (2021). Scientists' warning to humanity on threats to indigenous and local knowledge systems. *Journal of Ethnobiology*, 41(2), 144-169. <https://doi.org/10.2993/0278-0771-41.2.144>
- Fernández-Llamazares, Á., Lepofsky, D., Lertzman, K., Armstrong, C. G., Brondizio, E. S., Gavin, M. C., Lyver, P. O. B., Nicholas, G. P., Pascua, P., Reo, N. J., Reyes-García, V., Turner, N. J., Yletyinen, J., Anderson, E. N., Balée, W., Cariño, J., David-Chavez, D. M., Dunn, C. P., Garnett, S. C., ... Vaughan, M. B. (2021). Scientists' Warning to Humanity on Threats to Indigenous and Local Knowledge Systems. *Journal of Ethnobiology*, 41(2), 144-169. <https://doi.org/10.2993/0278-0771-41.2.144>
- Gadgil, M., Berkes, F., & Folke, C. (1993). Indigenous knowledge for biodiversity conservation. *Ambio-Stockholm*, 22, 151-151.
- García Canclini, N. (1995). *Hybrid Cultures: Strategies for Entering and Leaving Modernity*. University of Minnesota Press.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. Basic Books.
- Gigoux, C., & Samson, C. (2015). *Globalization and Indigenous peoples: New old patterns*. In *The Routledge international handbook of globalization studies* (pp. 272-295). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315867847-17>
- Greenfield, P. M. (2009). Linking social change and developmental change: shifting pathways of human development. *Developmental psychology*, 45(2), 401. <https://doi.org/10.1037/a0014726>
- Hershey, R. A. (2019). "Paradigm Wars" Revisited: New Eyes on Indigenous Peoples' Resistance to Globalization. *The Indigenous Peoples' Journal of Law, Culture & Resistance*, 5(1). <https://doi.org/10.5070/p651043049>
- Hilman, I., Hendriawan, N., & Sunaedi, N. (2019, November). Culture of Local Wisdom of Kampung Kuta Community in Facing Climate Changes in Ciamis Regency, West Java. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 338, No. 1, p. 012006). IOP Publishing. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/338/1/012006>
- Hiwasaki, L., Luna, E., & Shaw, R. (2014). Process for integrating local and indigenous knowledge with science for hydro-meteorological disaster risk reduction and climate change adaptation in coastal and small island communities. *International journal of disaster risk reduction*, 10, 15-27. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2014.07.007>
- Howitt, R. (2002). *Rethinking resource management: Justice, sustainability and indigenous peoples*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203221020>
- Ismadi, H. D. (2014). *Ketahanan budaya: Pemikiran dan wacana*. Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan.
- Jadidah, I. T., Alfarizi, M. R., Liza, L. L., Sapitri, W., & Khairunnisa, N. (2023). Analisis Pengaruh Arus

Nurholis, E., Sudarto, Budiman, A., Ramdani, D. (2025). Strategi Adaptasi Sistem Pengetahuan Adat Komunitas Kampung Kuta dalam Menghadapi Tekanan Globalisasi: Studi Kritis Terhadap Ketahanan Budaya dan Konservasi Alam. *Jurnal Artefak*, 12 (1), 237 – 254.

- Globalisasi Terhadap Budaya Lokal (Indonesia). *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 3(2), 40-47.
<https://doi.org/10.47200/aossagcj.v3i2.2136>
- Kirmayer, L. J., Dandeneau, S., Marshall, E., Phillips, M. K., & Williamson, K. J. (2011). Rethinking resilience from indigenous perspectives. *The Canadian Journal of Psychiatry*, 56(2), 84-91.
<https://doi.org/10.1177/070674371105600203>
- Kirmayer, L. J., Sehdev, M., Whitley, R., Dandeneau, S. F., & Isaac, C. (2009). Community resilience: Models, metaphors and measures. *International Journal of Indigenous Health*, 5(1), 62-117.
<https://ips.library.utoronto.ca/index.php/ijih/article/view/28978>
- Kusumawati, F. (2022). *Kelembagaan Pengelolaan Common Pool Resource Oleh Desa di Kapanewon Prambanan Daerah Perbukitan Dalam Mengatasi Masalah Krisis Air di Masyarakat* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa" APMD").
- Lauren, C. C. (2023). Analisis adaptasi masyarakat lokal terhadap perubahan sosial dan tren budaya di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum adat. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(09), 874-884.
- Leavy, P. (2022). *Research design: Quantitative, qualitative, mixed methods, arts-based, and community-based participatory research approaches*. Guilford publications.
- McGregor, D. (2004). Coming full circle: Indigenous knowledge, environment, and our future. *American Indian Quarterly*, 28(3/4), 385-410.
<http://www.jstor.org/stable/4138924>
- Middleton, D. (2010). *Cultural Dynamics and Social Roles*. Social Science Journal.
- Moller, H., Berkes, F., Lyver, P. O. B., & Kislalioglu, M. (2004). Combining science and traditional ecological knowledge: monitoring populations for co-management. *Ecology and society*, 9(3).
<https://www.jstor.org/stable/26267682>
- Mubah, A. S. (2011). Strategi meningkatkan daya tahan budaya lokal dalam menghadapi arus globalisasi. *Jurnal Unair*, 24(4), 302-308.
- Mubah, A. S. (2011). Revitalisasi identitas kultural Indonesia di tengah upaya homogenisasi global. *Global & Strategis, Edisi Khusus*, 251-260.
- Mustikasari, M., Arlin, A., & Kamaruddin, S. A. (2023). Pemikiran Pierre Bourdieu dalam Memahami Realitas Sosial. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, 6(1), 9-14.
<https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i1.5089>
- Nisa, A., & Surtikanti, H. K. (2024). Environmental ethics of Kuta traditional village community in preserving the environment and its future prospects. *Interaction, Community Engagement, and Social Environment*, 1(2).
<https://doi.org/10.61511/icese.v1i2.2024.388>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Panjaitan, P. F., & Albina, M. (2025). Adaptasi Budaya Dalam Kehidupan Modern. *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, 2(3), 490-495.
<https://jurnal.itc.web.id/index.php/jkis/article/view/2200>
- Philia, I. T., Sembiring, T., Siahaan, R. Y., Pratama, D. E., & M. Iqbal. (2025). Dampak Modernisasi Terhadap Dinamika Kebudayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kewarganegara Indonesia*, 2(2), 10–22.
<https://doi.org/10.61132/jupenkei.v2i2.239>
- Rohman, S. N., Maryani, E., & Yani, A. (2022, November). Local wisdom of the indigenous society of kampung kuta in maintaining leuweung gede as a form of environmental conservation efforts. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1089, No. 1, p. 012051). IOP Publishing. 10.1088/1755-https://doi.org/1315/1089/1/012051

Sudarto, S., Wardo, W., Sariyatun, S., & Musadad, A. A. (2025). Integrasi Pedagogi Reflektif dan Eco-Pedagogy dalam Konstruksi Kausalitas Sejarah: Membangun Kesadaran Nilai Lingkungan Melalui Landscape Budaya dalam Pembelajaran Sejarah. *Jurnal Artefak*, 12 (1), 213 – 236.

- Ruslan, I. (2015). Penguatan ketahanan budaya dalam menghadapi derasnya arus budaya asing. *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 11(1), 1-18. <https://doi.org/10.24042/tps.v11i1.838>
- Saefudin, A., Santyaningtyas, A. C., Lubis, A. F., & Mokodenseho, S. (2023). History, cultural shifts, and adaptation in social change: An ethnographic study in the Aboge Islamic community. *Journal of Innovation in Educational and Cultural Research*, 4(2), 303-310. <https://doi.org/10.46843/jiecr.v4i2.596>
- Sallis, J. F., Cervero, R. B., Ascher, W., Henderson, K. A., Kraft, M. K., & Kerr, J. (2006). An ecological approach to creating active living communities. *Annual review of public health*, 27(1), 297-322. <https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.27.021405.102100>
- Sanabria-Rangel, A. A. (2023). Environmental Justice and Globalization: Putting a Focus on Indigenous Peoples and Local Community Rights and Perspectives. *Journal of Environmental Law & Policy*, 03(03), 1-22. <https://doi.org/10.33002/jelp030301>
- Sardiyarso, E. S., & Puspitasari, P. (2018). Myth and Social Imagination: Traditional Village Preservation Concept (Case Study: Kampung Adat Kuta, Ciamis, West Java). *International Journal on Livable Space*, 3(1), 1-12. <https://doi.org/10.25105/livas.v3i1.3861>
- Schlosberg, D. (2007). *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*. Oxford University Press.
- Siregar, A., Yanti, D. D., Sipayung, D. V., Adani, M. I., Rianti, N. P., & Purnamasari, I. (2024). Pengaruh globalisasi terhadap identitas budaya lokal. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(8), 4142-4151. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/1218>
- Smith, C., Burke, H., & Ward, G. K. (2020). *Globalisation and indigenous peoples: Threat or empowerment?*. In Indigenous cultures in an interconnected world (pp. xviii-24). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003116097-1>
- Smith, L. T. (1999). *Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples*. Zed Books.
- Sterling, E., Ticktin, T., Morgan, T. K. K., Cullman, G., Alvira, D., Andrade, P., ... & Wali, A. (2017). Culturally grounded indicators of resilience in social-ecological systems. *Environment and Society*, 8(1), 63-95. <https://doi.org/10.3167/ares.2017.080104>
- Sudarto, S., Wijayanti, Y., Pramesti, C. S., & Agustina, D. D. Pengelolaan Pertanian Berkelanjutan Berbasis Eco-spirituality dalam Tradisi Komunitas Adat Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Cultural Socio-Ecological System (Studi Pada Tradisi Komunitas Adat Di Tajakembang-Cilacap). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 30(3), 367-390. <https://doi.org/10.22146/jkn.100561>
- Syakhsiyyah, T., Safitri, D., & Sujarwo, S. (2025). Dampak Globalisasi Terhadap Perubahan Budaya Lokal pada Masyarakat. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(6), 12421-12428. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/3907>
- Syahwal, S., Wahanisa, R., & Mukminto, E. (2024). Resistensi Demi Lingkungan Hidup: Masyarakat Adat Dalam Putusan-Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Proceeding APHTN-HAN*, 2(1), 361-390. <https://doi.org/10.55292/4xxsf817>
- Walker, B., Holling, C. S., Carpenter, S. R., & Kinzig, A. (2004). *Resilience, Adaptability and Transformability in Social-ecological Systems*. Ecology and Society.
- WCED (World Commission on Environment and Development). (1987). *Our Common Future*. Oxford University Press.
- Whyte, K. P. (2013). On the role of traditional ecological knowledge as a collaborative concept: A philosophical study. *Ecological processes*, 2(1), 7. <https://doi.org/10.1186/2192-1709-2-7>

Nurholis, E., Sudarto, Budiman, A., Ramdani, D. (2025). Strategi Adaptasi Sistem Pengetahuan Adat Komunitas Kampung Kuta dalam Menghadapi Tekanan Globalisasi: Studi Kritis Terhadap Ketahanan Budaya dan Konservasi Alam. *Jurnal Artefak*, 12 (1), 237 – 254.

Wijaya, D. (2025). Cultural Identity and Globalization: Challenges and Adaptations in Indigenous Communities. *International Journal of Innovation and Thinking*, 2(3), 144-154.

<https://doi.org/10.71364/ijit.v2i3.20>

Young, O. R., Berkhout, F., Gallopin, G. C., Janssen, M. A., Ostrom, E., & Van der Leeuw, S. (2006). The globalization of socio-ecological systems: An agenda for scientific research. *Global environmental change*, 16(3), 304-316.
<https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.03.004>

Zulfa, E. A. (2010). Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia. *Indonesian Journal of Criminology*, 6(II). 182-203.